



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026

**Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan**

panganbiru



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Triwulan I Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMKP selama Triwulan I Tahun 2026, yang diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai instrumen penilaian kinerja kuantitatif, laporan kinerja ini diharapkan menjadi cerminan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMKP secara transparan dan bertanggung jawab, dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini juga berperan sebagai alat kendali dan pendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Kami berharap, Capaian Kinerja yang disajikan dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada periode dimaksud.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama, sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik. Semoga laporan ini memberikan manfaat optimal dan dapat dijadikan rujukan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang



Jakarta, 21 April 2026
Sekretaris BPPSDMKP,

Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi.,M.Si.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. TUJUAN.....	1
1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	1
1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).....	3
1.5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1. RENCANA STRATEGIS	7
2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2025.....	10
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK).....	12
2.4. PENGUKURAN KINERJA.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	17
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	35
BAB IV PENUTUP	38
4.1. KESIMPULAN.....	39
4.2. REKOMENDASI	41
LAMPIRAN	42





DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dukungan Anggaran Lingkup Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2026	11
Tabel 2. PK Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2026	12
Tabel 3. Status Indeks Capaian IKU	13
Tabel 4. Capaian Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2026	17
Tabel 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDM KP.....	19
Tabel 6. Rekapitulasi Capaian IKU "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP Periode Triwulan I Tahun 2026	20
Tabel 7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDM KP	32
Tabel 8. Rekapitulasi Capaian IKU "Persentase Rencana Umum Pengadaan" Triwulan I Tahun 2026 lingkup KKP	32
Tabel 9. Realisasi Anggaran Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2026	36
Tabel 10. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDM KP Triwulan I Tahun 2026	40





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2026	vi
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025	3
Gambar 3 Keragaan Pegawai Sekretariat BPPSDM berdasar Status.....	4
Gambar 4 Keragaan Pegawai Sekretariat BPPSDM berdasar Jenis Kelamin	4
Gambar 5 Keragaan Pegawai Sekretariat BPPSDMKP berdasar Pendidikan	4
Gambar 6 Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2026	16
Gambar 7 Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2026	39





IKHTISAR EKSEKUTIF

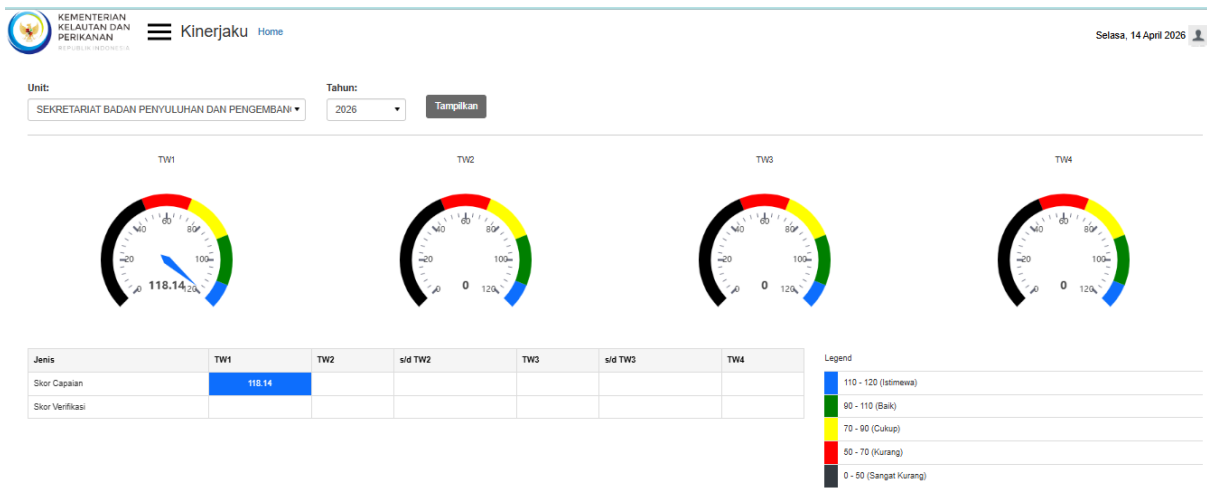
Sekretariat BPPSDMKP memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai koordinator kinerja pada empat unit teknis, yaitu Pusat Penyuluhan, Pusat Pelatihan, Pusat Pendidikan, dan Pusat Standardisasi dan Sertifikasi tetapi juga berfungsi sebagai Unit Organisasi Pembina bagi 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi:

1. Balai Riset Perikanan Laut
2. Balai Riset Budidaya Ikan Hias
3. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
4. Balai Riset Pemuliaan Ikan
5. Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
6. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil
7. Loka Riset Perikanan Tuna
8. Loka Riset Budidaya Rumput Laut
9. Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Seiring dengan mandat tersebut, Sekretariat BPPSDMKP memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh capaian kinerja UPT yang berada di bawah pembinaannya.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP pada Triwulan I tahun 2026, yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP yang ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2026, terjadi peningkatan nilai kinerja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian kinerja meningkat dari 112,92 pada Triwulan I Tahun 2025 menjadi 118,14 pada Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana ditampilkan dalam *dashboard* kinerja berikut:





Gambar 1 Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2026

Sumber : Aplikasi Kinerjaku Tahun 2026

Dari 15 (lima belas) Indikator Kinerja (IK), terdapat 2 (dua) IK yang terlaporkan memiliki capaian pada Triwulan I Tahun 2026, sementara 13 (tiga belas) IK lainnya akan dilaporkan setiap semester dan tahunan. Adapun rincian NKO pada masing-masing IK adalah sebagai berikut:

1. **IK.01.** Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM KP (%) dengan target 86%, telah tercapai sebesar 100%, atau telah tercapai 116,28% dari target yang ditetapkan.
3. **IK.12.** Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDM KP dengan target 77%, telah tercapai 100%, atau 120% dari target yang ditetapkan.

Berkenaan hasil capaian tersebut beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja dipertahankan sebagai bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta mendorong pencapaian reformasi birokrasi. Untuk itu, pemantauan dan pengukuran kinerja harus dilakukan secara sistematis dan berkala, guna memitigasi hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.
2. Dokumen atau bukti dukung capaian kinerja harus dipersiapkan dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaporan kinerja yang disajikan.

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja
Triwulan I Tahun 2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. TUJUAN

Laporan Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada setiap instansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian kinerja organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat BPPSDMKP ini, bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur dan objektif atas capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP pada Triwulan I Tahun 2026;
2. Mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan, sebagai dasar evaluasi peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMKP pada periode berikutnya.

1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kelembagaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretariat BPPSDMKP berperan sebagai pendukung pendukung bagi BPPSDMKP bersama dengan 4 (empat) unit kerja eselon II (dua) lainnya yaitu :

1. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
2. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
3. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, dan
4. Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

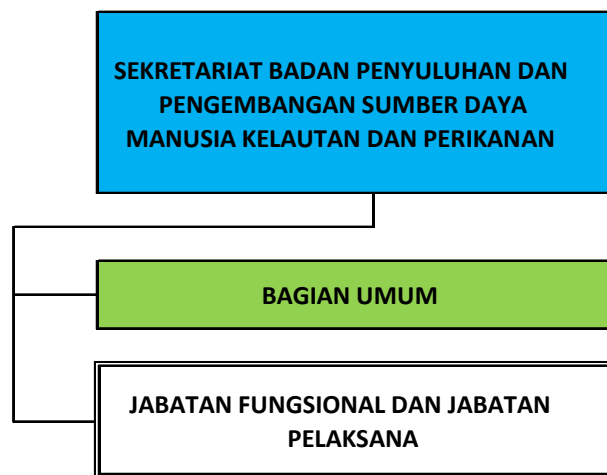


Sekretariat BPPSDMKP dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPPSDMKP. Sekretariat memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPPSDMKP dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dalam penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas bagian umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana gambar berikut:

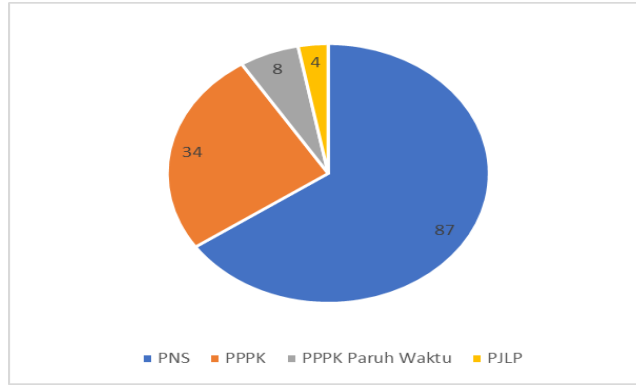


Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

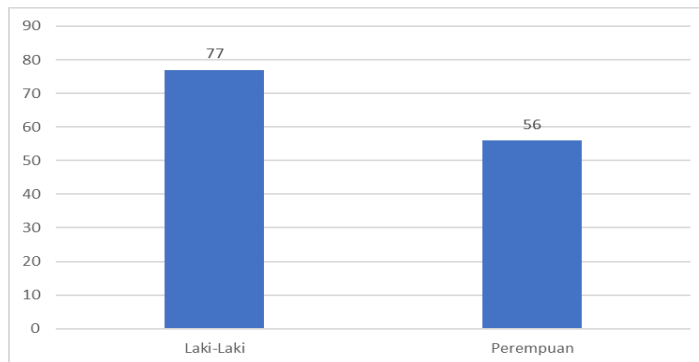
1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sekretariat BPPSDMKP didukung oleh 133 personil yang terdiri atas 129 Aparatur Sipil Negara, terdiri dari 87 Pegawai Negeri Sipil, 34 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan 8 PPPK paruh waktu. Selain itu Sekretariat BPPSDM KP juga didukung oleh personil PJLP sebanyak 4 orang.



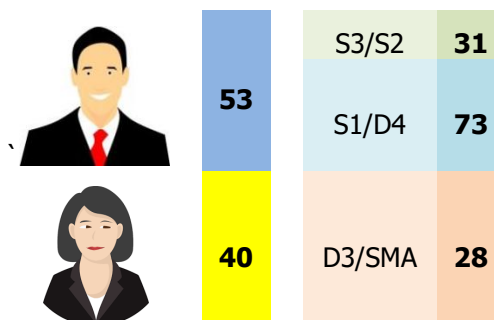
Gambar 3 Keragaan Pegawai Sekretariat BPPSDM berdasar Status

Berdasarkan jenis kelamin, dari 133 Personil Sekretariat BPPSDM KP, terdiri dari 77 laki-laki dan 56 perempuan.



Gambar 4 Keragaan Pegawai Sekretariat BPPSDM berdasar Jenis Kelamin

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 31 orang berpendidikan S2/S3, sebanyak 73 orang berpendidikan S1/D4, serta sebanyak 28 orang berpendidikan D3/SMA dan 1 orang berpendidikan SD (Data Kepegawaian, per Februari 2026). Dari 129 jumlah ASN di Sekretariat BPPSDMKP, 3 orang diantaranya dipekerjakan/ditugaskan pada instansi lain.



Gambar 5 Keragaan Pegawai Sekretariat BPPSDMKP berdasar Pendidikan
Sumber : Tim Kerja SDMAO Sekretariat BPPSDM

1.5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Sistematika laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama triwulan I tahun 2026.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Sekretariat BPPSDM KP seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Sekretariat BPPSDMKP.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang rencana strategis Sekretariat BPPSDMKP 2025-2029, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja Sekretariat BPPSDMKP tahun 2026 serta pengukuran kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
5. **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. **Lampiran:**

Perjanjian Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja
Triwulan I Tahun 2026

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Pelaksanaan kinerja Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BPPSDMKP tahun 2025-2029 yang mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025-2029, dengan memiliki peran strategis dalam mendukung tujuh dari delapan Asta Cita dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut dirumuskan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2025, BPPSDMKP merupakan unit eselon I yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, serta memiliki tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Sekretariat BPPSDMKP merupakan unit pendukung yang melaksanakan pelayanan teknis



dan administrasi guna memastikan kelancaran kinerja unit organisasi. Peran tersebut sejalan dengan implementasi Asta Cita ke-4.

A. Visi

Visi disusun berdasarkan visi Indonesia 2045 yaitu "Mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur." Selaras dengan itu, Visi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Sebagai instansi yang mendukung—Presiden dalam urusan kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan misi sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) merumuskan visi spesifik, yaitu *"Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan."*

B. Misi

Dalam melaksanakan misi KKP ke-3 yaitu "Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan perikanan". Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, BPPSDMKP menetapkan misi yaitu *"Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional"*.

C. Tujuan

Untuk mewujudkan Misi BPPSDMKP Tahun 2025-2029 disusun tujuan yaitu **"Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP yang Inovatif, Kompeten dan Berdaya Saing"** dengan indikator meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.

Fokus utama tujuan strategis terletak pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang inovatif, kompeten, dan berdaya saing. Pencapaian tujuan ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru yang inovatif dan berdaya saing, kelembagaan kelompok pelaku usaha yang kuat dan mandiri serta menghasilkan calon wirausaha muda baru yang berlatar belakang pendidikan serta menjawab kebutuhan calon tenaga kerja melalui adanya keterhubungan lebih kuat antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Selain itu, tujuan juga diarahkan untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Sasaran Kegiatan

Sekretariat BPPSDMKP mendukung pencapaian sasaran program Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029, khususnya pada Kegiatan "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan", melalui 15 (lima belas) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM KP.
2. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM KP.

- 
3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM KP.
 4. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDM KP
 5. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM KP.
 6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDM KP
 7. Nilai Pembangunan Integritas BPPSDM KP.
 8. Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM KP.
 9. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDM KP.
 10. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDM KP.
 11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP.
 12. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDM KP.
 13. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM KP.
 14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDM KP.
 15. Persentase Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang Terimplementasi secara Efektif dan Terdokumentasi.

2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis, Rencana Kerja Sekretariat BPPSDM KP Tahun 2025, selain menetapkan satu sasaran Kegiatan yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” melalui 15 (lima belas) indikator kinerja.

Sejak Triwulan III Tahun 2024, terjadi perubahan profil rencana kerja Sekretariat BPPSDM KP seiring dengan perubahan unit organisasi pembina

administrasi dan teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPPSDMKP. Perubahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Sekretariat BPPSDMKP berperan sebagai Unit Pembina terhadap 9 (Sembilan) UPT sebagai berikut :

1. Balai Riset Perikanan Laut (BRPL), Jakarta;
2. Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok;
3. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) Jatiluhur;
4. Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi;
5. Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Bungus;
6. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul;
7. Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) Benoa;
8. Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) Gorontalo;
9. Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LRPTK) Wakatobi.

Sejalan dengan dinamika tersebut, dukungan anggaran sebagaimana tercantum dalam dalam Rencana Kerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 mengalami 1 (satu) kali perubahan, sebagai berikut:

Tabel 1. Dukungan Anggaran Lingkup Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2026

NO	KEGIATAN	ANGGARAN SEMULA (Rp.)	REVISI ANGGARAN I (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup BPPSDM KP	38.969.730.000	31.918.571.000
2	Dukungan Manajemen Internal lingkup BPPSDM KP (Satker Binaan Sekretariat BPPSDM KP)	46.837.832.000	46.837.832.000
Total Anggaran lingkup Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2026		85.807.562.000	78.756.403.000

Sumber : PK Sekretariat BPPSDMKP tanggal 5 Januari 2026 dan 31 Maret 2026

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (PK). Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit kerja pembinanya dalam melaksanakan amanah dan target kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No 53 Tahun 2014.

Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2026 ditandatangani pada tanggal 5 Januari 2026 dan mengalami revisi sekali, pada tanggal 31 Maret 2026 dikarenakan adanya pergantian pimpinan dari Plt. Sekretaris BPPSDMKP menjadi Sekretaris BPPSDMKP, dengan adanya perubahan anggaran dan Indikator Kinerja Kegiatan yang semula 14 (empat belas) IKK menjadi 15 (lima belas) IKK. Perubahan pada Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. PK Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2026

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target	Target Revisi I
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM KP	86	86
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM KP	≤0,5	≤0,5
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM KP	92,1	92,1
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDM KP	3,6	3,6
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM KP	88,2	88,2
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDM KP	81,75	81,75
		7	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDM KP	77	77
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM KP	81,5	81,5
		9	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDM KP	85	85
		10	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDM KP	100	100

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target	Target Revisi I
		11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP	81	81
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDM KP	77	77
		13	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM KP	78	78
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDM KP	92	92
		15	Persentase Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang Terimplementasi secara Efektif dan Terdokumentasi	-	60

Sumber : PK Sekretariat BPPSDMKP tanggal 5 Januari 2026 dan 31 Maret 2026

2.4. PENGUKURAN KINERJA

2.4.1 Teknik Penghitungan

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil perbandingan tersebut dikonversikan menjadi indeks capaian IKU. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Capaian maksimum adalah 120%
2. Capaian minimum adalah 0%
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda; dan
4. Status indeks capaian IK adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Status Indeks Capaian IKU

Warna	Rentang Nilai	Status Indeks
	Nilai 110 - 120	Istimewa
	Nilai 90 - <110	Baik
	Nilai 70 - <90	Cukup
	Nilai 50 - <70	Kurang
	Nilai <50	Sangat Kurang
		Belum ada penilaian

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku



2.4.2 Tata Cara Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja Sekretariat BPPSDMKP dilakukan setiap triwulan, yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Kerja Monev dan Pelaporan, dimulai dari masing-masing penanggung jawab IKU hingga ke level Pimpinan. Tahapan akhir dari proses ini adalah verifikasi dan validasi capaian kinerja, untuk memastikan kesesuaian antara capaian yang dilaporkan di aplikasi Kinerjaku dan data dukung yang dilampirkan oleh satuan kerja terkait.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja
Triwulan I Tahun 2026

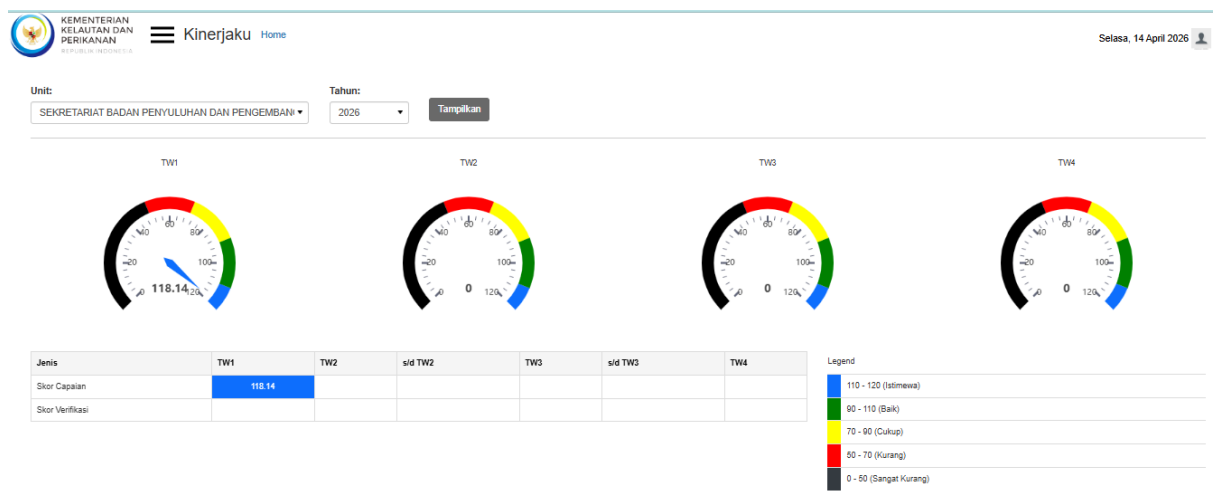
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP meningkat dari 112,92 pada Triwulan I Tahun 2025 menjadi 118,14 pada Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana *dashboard* kinerja sebagai berikut:



Gambar 6 Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2026

Sumber : Aplikasi Kinerjaku Tahun 2026

Pada Tahun 2026 Sekretariat BPPSDMKP melaksanakan program dukungan manajemen yang dilaksanakan melalui kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari

15 (lima belas) Indikator kinerja dengan hasil pengukuran pada triwulan 1, yaitu 2 (dua) IKU berkinerja Istimewa (nilai 110-120).

Faktor-faktor tersebut yang menjadi pengungkit yang signifikan dalam pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat BPPSDMKP di kategorikan istimewa berdasarkan indeks dalam Aplikasi Kinerja (tabel 3).

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam:

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Evaluasi ini mencakup perbandingan antara target (rencana) dan realisasi tahun berjalan, perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, serta evaluasi terhadap target jangka menengah. Analisis juga dilakukan terhadap faktor keberhasilan maupun penurunan kinerja yang terjadi pada masing-masing indikator kinerja utama, berdasarkan Sasaran Kegiatan yang ditetapkan.

Capaian kinerja secara rinci Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Capaian Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2026

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Target TW 1 2026	Capaian TW 1 2026	%
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	%	86	86	100	116,28



No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Target TW 1 2026	Capaian TW 1 2026	%
	dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM KP	%	0,5			
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM KP	%	92,1			
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDM KP	Level	3,6			
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM KP	Nilai	88,2			
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDM KP	Nilai	81,75			
		7	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDM KP	Nilai	77			
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM KP	Indeks	81,5			
		9	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDM KP	%	85			
		10	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDM KP	%	100			
		11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP	Nilai	81			
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDM KP	%	77	77	100	120
		13	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM KP	Nilai	78			
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDM KP	%	92			
		15	Persentase Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang Terimplementasi secara Efektif dan Terdokumentasi	%	60			

Sumber: Aplikasi Kinerjaku





SASARAN KEGIATAN -1

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” didukung oleh 15 (lima belas) Indikator Kinerja (IK) yang ditetapkan dan diukur keberhasilannya sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA 1

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDMKP

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP mengukur jumlah rekomendasi hasil pengawasan inspektorat jenderal (meliputi Audit, Reviu, Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret 2026 (Triwulan I Tahun 2026). Status tindak lanjut yang dimaksud adalah “TUNTAS” oleh seluruh satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan.

Pengukuran indikator ini dilakukan setiap Triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM KP Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDM KP

IK 1- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP										
Realisasi TW I					2025				Renstra BPPSDM 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
				90,64	86	100	116,28	10,32	89	112,36

Sumber: Aplikasi Kinerjaku



Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 582/ITJ.0/TU.140/IV/2026 tanggal 13 April 2026, tentang Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM KP pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100% atau 116,28% dari target sebesar 86%. Capaian Indikator ini jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2024, yaitu sebesar 90,64%, mengalami kenaikan sebesar 10,32%. Namun, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) telah mencapai 112,36%.

Jika dibandingkan dengan eselon I lain lingkup KKP diperoleh data pada Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6. Rekapitulasi Capaian IKU"Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP Periode Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Capaian TW I 2026
1	Setjen	100 %
2	Ditjen PK	85,44%
3	Ditjen PRL	100%
4	Ditjen Perikanan Tangkap	75%
5	Ditjen PSDKP	100%
6	Ditjen Perikanan Budidaya	97,46%
7	BPPSDM KP	100%
8	Ditjen PDSPKP	89,29%
9	BPPMHKP	96,67%
10	Itjen	100%

Dari tabel diperoleh capaian BPPSDM KP sebesar 100 %, dimana capaian yang sama diperoleh juga oleh Setjen, Ditjen PRL, Ditjen PSDKP dan Itjen.



Faktor-faktor yang mendorong pencapaian indikator kinerja ini antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan koordinasi yang efektif dengan tim Inspektorat Jenderal KKP.

Kegiatan pendukung pencapaian indikator ini antara lain :

- Pendampingan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan pada unit kerja teknis Politeknik AUP, Politeknik KP Sorong, Politeknik KP Karawang, Politeknik KP Bone, AKKP Wakatobi, Politeknik KP Dumai, BPPP Tegal, BPPP Bitung, dan BPPP Ambon pada tanggal 6 Februari 2026;
- Pendampingan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan pada Pusat Pendidikan KP terkait Hasil Pengawasan Pekerjaan Konsultan Perencanaan Modernisasi Sarpras Pendidikan KP tanggal 25 Februari 2026;
- Kompilasi berkas/dokumen tindak lanjut sesuai rekomendasi Tim Auditor Inspektorat Jenderal;
- Penginputan dan pengunggahan dokumen tindak lanjut ke dalam aplikasi SIDAK;
- Penyampaian dokumen Tindak lanjut yang telah diunggah dalam aplikasi SIDAK kepada auditor;
- Koordinasi dengan tim auditor terkait Berita Acara Tindak Lanjut (BATL) atas dokumen yang telah disampaikan.

INDIKATOR KINERJA 2

Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM KP

Indikator Kinerja Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP merupakan nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi BPPSDMKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran BPPSDMKP tahun 2025.



Tingkat Validitas Indikator ini merupakan output tingkat kendali rendah. Sementara pengukuran dilakukan secara tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai Triwulan I 2026, yaitu melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI terhadap LK KKP dengan Biro Keuangan KKP.

INDIKATOR KINERJA 3

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM KP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pengukuran dilakukan berdasarkan variabel berikut :

- Penyerapan Anggaran (bobot 20%),
- Pengelolaan Uang Persediaan (10%)
- Penyelesaian Tagihan (20%)
- Deviasi Halaman III DIPA (11),
- Penyampaian Data Kontrak,
- Penyampaian LPJ Bendahara,
- Revisi DIPA,
- Pengembalian/Kesalahan SPM,
- Dispensasi SPM,
- Renkas/RPD Harian,
- Retur SP2D (masing masing 5%).



Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencerminkan kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Tingkat Validitas indikator ini adalah output kendali rendah, dengan periode pengukuran adalah semesteran dan polarisasi maximize.

Kegiatan yang sudah dilakukan selama Triwulan I Tahun 2026, yaitu 1) fasilitasi proses revisi halaman III DIPA pada 28 Satker; 2) perhitungan gaji dan tunjangan anggaran Sekretariat BPPSDMKP pada bulan Januari, Februari, dan Desember 2026; 3) perhitungan operasional perkantoran Sekretariat BPPSDMKP tahun 2026; 4) penyampaian Nota Dinas Sekretaris BPPSDMKP terkait penyelesaian tagihan kontraktual dan monitoring UP/TUP kepada Satker yang telah/akan jatuh tempo.

INDIKATOR KINERJA 4

Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN yang berisi sumber data dari Inspektorat Jenderal. Penilaian dilakukan terhadap pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan. Tingkatan maturitas SPIP meliputi: rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, dan optimum.

Pengukuran dilakukan secara tahunan, dengan validitas output kendali rendah dan polarisasi maximize.



Kegiatan yang telah dilakukan selama Triwulan I Tahun 2026, yaitu telah disusun SK Maturitas SPIP lingkup BPPSDMKP tahun 2026, pemantauan SPIP TW 1 2026 dan identifikasi risiko kegiatan lingkup BPPSDM KP.

INDIKATOR KINERJA 5

Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM KP

Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP merupakan Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara mandiri berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Aspek penilaian mencakup:

- perencanaan kinerja (30%)
- pengukuran kinerja (30%)
- pelaporan kinerja (15%)
- evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan capaian Unit Eselon I dan dikeluarkan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, melalui surat resmi.

Pengukuran Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP adalah tahunan dengan validitas output kendali rendah dan polarisasi maximize.

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2026, yaitu 1) telah disusun dokumen perencanaan BPPSDMKP tahun 2026 antara lain : Rincian Target IKU BPPSDMKP Tahun 2026, Rencana Aksi BPPSDMKP Tahun 2026, PK BPPSDMKP Tahun 2026, Manual IK BPPSDMKP 2026 dan Cascading Rincian IK BPPSDMKP 2026; 2) verifikasi dan validasi level I BPPSDMKP tahun 2025; 3) penyusunan LKJ BPPSDMKP tahun 2025; 4) penyusunan Evaluasi Rencana Aksi BPPSDMKP dan Sekretariat BPPSDMKP; 5) reviu LKJ dan Rekonsiliasi kinerja serta tindak lanjut hasil reviu LKJ BPPSDMKP.

INDIKATOR KINERJA 6

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP



Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran tahun sebelumnya, bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dilakukan melalui aplikasi MONEV Kemenkeu oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga sesuai KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Formula pengukuran sesuai manual IKU didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun indikator dimaksud yaitu: Nilai Efektivitas Satker, Nilai Efisiensi Satker, Bobot Capaian Indikator Kinerja Program, Bobot Nilai Efektivitas Satker, dan Bobot Nilai Efisiensi Satker.

Pengukuran dilakukan secara tahunan dengan validitas output kendali rendah dan polarisasi maximize.

Kegiatan yang telah dilakukan selama Triwulan I Tahun 2026, yaitu 1) penginputan output SBK pada aplikasi monev Kemenkeu pada bulan Januari 2026; 2) koordinasi dan monitoring NKPA melalui monev kemenkeu pada 42 Satker lingkup BPPSDMKP; 3) penginputan dan persetujuan asesment RO oleh Kementerian Keuangan lingkup BPPSDMKP pada 60 program/kegiatan/KRO/RO; 4) monitoring capaian RO pada 42 Satker lingkup BPPSDMKP dengan ketercapaian pada triwulan I 100%.

INDIKATOR KINERJA 7

Nilai Pembangunan Integritas BPPSDM KP

Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.



Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : Pembangunan zona interitas (bobot 30%), Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%), Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%), Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%), Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%), Pengendalian Kecurangan (bobot 10%). Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal KKP.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2026, yaitu 1) penyusunan rekapitulasi Laporan harta kekayaan ASN lingkup BPPSDMKP dari target wajib lapor 6.608 yang terdiri dari PNS, PPPK penuh waktu dan paruh waktu ASN sudah lapor 6.146 dan LHKPN dari target wajib lapor 225 dan sudah lapor seluruh sesuai target; 2) penyampaian kepada Satker lingkup BPPSDMKP terkait usulan anggota Tim Penanganan Pengaduan (TPP) BPPSDMKP; 3) penyampaian kepada Satker lingkup BPPSDMKP terkait usulan anggota Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BPPSDM.

INDIKATOR KINERJA 8

Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM KP

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.



Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi penilaian yaitu kualifikasi dengan bobot maksimal 25, kompetensi dengan bobot maksimal 40, kinerja dengan bobot maksimal 30 dan disiplin dengan bobot maksimal 5.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan semesteran dengan polarisasi maximize.

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2026, yaitu 1) penyebarluasan informasi pelatihan melalui whatsapp grup pengelola kepegawaian lingkup BPPSDMKP dan pegawai Sekretariat BPPSDMKP sejumlah 32 pelatihan dengan rata-rata 2-3 Jam Pelajaran (JP); 2) Monitoring capaian IP ASN secara berkala berbasis aplikasi.

INDIKATOR KINERJA 9

Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Probis BPPSDM terdiri atas: Probis Level 1, Probis Level 2 dan Probis Level 3.

Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi eselon I dalam penyelesaian Probis Level 2 dan Level 3 serta SOP, tidak termasuk Probis Level 0



dan Level 1. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut:

1. Penyelesaian Probis Level 2, dengan bobot maksimal 15 (lima belas) persen. Variabel ini diukur berdasarkan penjabaran Probis Level 1 dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Target tercapai apabila usulan Probis Level 2 sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
2. Penyelesaian Probis Level 3, dengan bobot maksimal 40 (empat puluh) persen. Variabel ini merupakan penjabaran Probis Level 2. Target tercapai apabila Probis Level 3 telah selesai disusun sesuai jumlah Probis Level 2 dan sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
3. Identifikasi Judul SOP, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh) persen. Variabel ini diukur berdasarkan hasil identifikasi judul SOP dengan berpedoman kepada Probis Level 3. Target tercapai apabila Matriks Identifikasi Judul SOP sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
4. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 25 (dua puluh lima) persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi.
5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan Level 3, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Probis Level 2 dan Level 3 dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.



6. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

INDIKATOR KINERJA 10

Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDM KP

Indikator ini mengukur persentase capaian program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP Tahun 2025, yang telah diselesaikan hingga 31 Desember 2025. Penyelesaian dimaksud meliputi: (1) penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum; dan/atau (2) penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri.

Capaian dihitung dengan membandingkan jumlah peraturan perundang-undangan yang telah diselesaikan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan dalam Keputusan Menteri KP Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP Tahun 2025.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan semesteran dengan polarisasi maximize.



Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2026, yaitu 1) fasilitasi berupa pelaksanaan pertemuan yang melibatkan unit kerja pemrakarsa (pusat lingkup BPPSDMKP), set BPPSDM, Biro Hukum, Itjen III, dan unit kerja terkait untuk mengoordinasikan penyusunan Rancangan Permen dan Kepmen KP lingkup BPPSDMKP; 2) konsultasi publik akan dilaksanakan pada TW II dan TW III Tahun 2026.

INDIKATOR KINERJA 11

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.

Aspek/ formulasi pengukuran/ penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: pengelolaan Arsip Dinamis (50%), penciptaan arsip (25%), penggunaan arsip (25%), pemeliharaan arsip (25%), dan penyusutan arsip (25%).

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.



Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I Tahun 2026, yaitu 1) Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal tahun 2026 tanggal 12 Februari yang diselenggarakan oleh Biro Umum KKP dan ANRI; 2) identifikasi arsip lingkup BPPSDM yang berpotensi menjadi arsip vital diantaranya : Surat perjanjian kerjasama, Sertifikat tanah, BPKB, Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI); 3) telah disusun SK Tim Pengelola Simpul Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di lingkup KKP dan Laporan Kegiatan Kontributor SIKN lingkup BPPSDMKP Triwulan I tahun 2026.

INDIKATOR KINERJA 12

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDM KP

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP). Persentase RUP yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum SiRUP merepresentasikan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) di lingkungan KKP.

Nilai indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan satuan unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan dihitung dari total pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Validitas IK ini output kendali rendah, dengan pengukuran IK dilakukan secara Triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IK Persentase Rencana

Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDM KP Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDM KP

IK 12- Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDM KP										
Realisasi TW 1					2026				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
				100	77	100	120	0	80	125

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDM KP Triwulan I tahun 2025 sebesar 100% atau 120% dari target sebesar 80%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam perencanaan dan transparansi pengadaan. Capaian IK ini sama dengan capaian pada TW I Tahun 2025 dan jika dibandingkan dengan target pada Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029 diperoleh capaian sebesar 125%.

Jika dibandingkan dengan eselon I lain lingkup KKP diperoleh data pada Tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8. Rekapitulasi Capaian IKU "Persentase Rencana Umum Pengadaan" Triwulan I Tahun 2026 lingkup KKP

No	Unit Kerja	Capaian TW I 2026
1	Setjen	100 %
2	BPPMHKP	100 %
3	Ditjen PRL	100 %
4	Ditjen PSDKP	100 %
5	BPPSDMKP	100 %
6	Ditjen Perikanan Tangkap	100 %



No	Unit Kerja	Capaian TW I 2026
7	Itjen	99,99%
8	Ditjen PDSPKP	99,99%
9	Ditjen PK	99,48%
10	Ditjen Perikanan Budidaya	97,79%

Dari tabel diperoleh capaian BPPSDMKP sebesar 100 %, dimana capaian yang sama diperoleh juga oleh Setjen, BPPMHKP, Ditjen PRL, Ditjen PSDKP, dan Ditjen Perikanan Tangkap. Untuk Itjen, Ditjen PDSPKP, Ditjen PK dan Ditjen Perikanan Budidaya belum mencapai 100%.

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator kegiatan ini adalah komitmen dari seluruh pimpinan unit kerja lingkup BPPSDMKP dalam mendukung transparansi pada pengadaan barang/jasa dan dedikasi seluruh pelaksana terkait mulai dari indentifikasi sampai dengan input pada aplikasi SiRUP.

Keberhasilan Capaian IK ini pada triwulan I tahun 2025 didukung oleh kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan Sosialisasi mengenai perubahan mekanisme pengisian dan perhitungan Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan Surat Undangan Nomor B.192/BPPSDM.1/KP.510/I/2025 tanggal 9 Januari 2025;
2. Melakukan Pembahasan dan Pendampingan kepada Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP atas Penyesuaian Rencana Umum Pengadaan TA. 2025 Pasca Revisi sesuai dengan Surat Undangan Nomor B.2854/BPPSDM.1/TU.330/III/2025 tanggal 11 Maret 2025;
3. Melakukan Pembahasan dan Pendampingan kepada Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP atas Finalisasi Rencana Umum Pengadaan TA. 2025 yang akan digunakan sebagai nilai capaian IKU lingkup BPPSDMKP sesuai dengan Surat Undangan Nomor B.2980/BPPSDM.1/TU.330/III/2025 tanggal 18 Maret 2025;
4. Melakukan Pendampingan kepada Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP atas Evaluasi Pengisian Penilaian Penyedia TA. 2024 dan Rencana Umum



Pengadaan TA. 2025 sesuai dengan Surat Undangan Nomor B.3075/BPPSDM.1/TU.330/III/2025.

INDIKATOR KINERJA 13

Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No.3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan KIPP Tahun 2023. Pengukuran dilakukan pada Proposal inovasi yang masuk ke dalam Berita Acara Tim Penilai Internal KKP dengan nilai minimum 77.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2026, yaitu proses review proposal inovasi pelayanan publik lingkup BPPSDMKP tahun 2026.

INDIKATOR KINERJA 14

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDM KP

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan pengumpulan, pengelolaan, penyajian, dan pelaporan data ke unit Teknik yang ada di KKP sampai dengan validasi nasional. Terdapat 2 (dua) variabel pengukuran, yaitu 1. Persentase jumlah pelaku usaha KP yang terintegrasi (X1) dan 2. Persentase realisasi data geospasial yang terintegrasi (X3).



Tingkat Validitas Indikator Kinerja output kendali rendah. Pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2026, yaitu :

- 1) Pengusulan ke aplikasi romantik (rekomendasi statistik) BPS dan telah memperoleh rekomendasi terkait Data Kelompok yang disuluh dengan verifikasi data sebagai berikut :
 - a. Data yang dikoleksi relevan dan memiliki dasar hukum/tujuan yang jelas.
 - b. Variabel data menggunakan standar yang diakui secara nasional.
 - c. Output data akan berkualitas dan dapat dibandingkan dengan data lain di dalam ekosistem Satu Data Indonesia
- 2) Penyusunan Buku statistik pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan tahun 2025;

INDIKATOR KINERJA 15

Persentase Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Terimplementasi

Presentase jumlah dokumen kerja sama penyuluhan dan pengembangan SDM kelautan dan perikanan yang ditandatangani dan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan yang relevan dengan tugas dan fungsi BPPSDMKP, serta didukung dokumentasi pelaksanaan yang dapat diverifikasi.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan rekapitulasi data OM SPAN sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, pagu anggaran Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 31.918.571.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.321.706.035,- atau sebesar 22,94 % terhadap pagu efektif dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 9. Realisasi Anggaran Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%
1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM KP	Layanan Manajemen Keuangan	86.744.000	23.795.449	27,43
2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM KP		127.325.000	38.889.000	30,54
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM KP		29.499.577.000	6.869.253.203	23,29
4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDM KP		42.142.000	170.000	0,40
5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM KP	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	201.282.000	56.306.600	27,97
6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDM KP		243.906.000	60.179.783	24,67
7	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDM KP	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	32.340.000	11.980.500	37,05
8	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM KP	Layanan Manajemen ASN	70.010.000	12.920.000	18,45
9	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDM KP	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	19.000.000	3.401.000	17,90
10	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDM KP	Layanan Umum	92.215.000	8.285.405	8,98





INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%
11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP		907.555.000	122.231.733	13,47
12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDM KP		93.855.000	43.493.365	46,34
13	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM KP		157.302.000	56.573.167	35,96
14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDM KP		157.000.000	11.791.330	7,51
15	Persentase Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang Terimplementasi secara Efektif dan Terdokumentasi		188.318.000	2.435.500	1,29
TOTAL			31.918.571.000	7.321.706.035	22,94

Sumber: Pengelola Keuangan Sekretariat BPPSDMKP per 31 Maret 2026

Secara umum anggaran Sekretariat BPPSDMKP pada triwulan 1 tahun 2026 dapat dimanfaatkan cukup baik dengan realisasi anggaran mencapai 22,94 % dari pagu.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2026, beberapa hal perlu mendapatkan perhatian yang merupakan kondisi yang mempengaruhi penyerapan anggaran, antara lain adanya keterlambatan ataupun kesalahan dalam penyiapan dokumen pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat proses pembayaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja
Triwulan I Tahun 2026

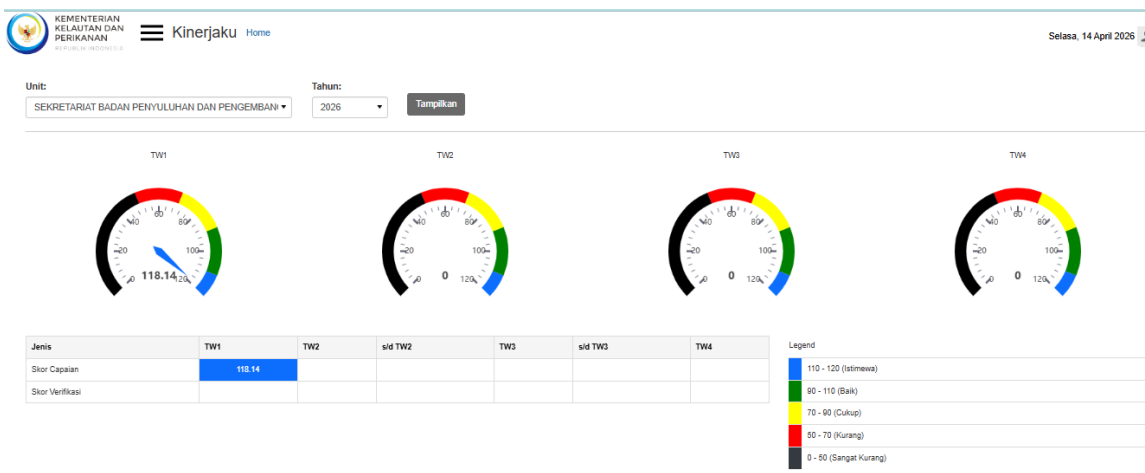
BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pada Tahun 2026, Sekretariat BPPSDMKP, memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan, yaitu : Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Sasaran kegiatan tersebut dijabarkan menjadi 14 (empat belas) Indikator Kinerja (IK), yang masing-masing didukung oleh alokasi anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan dan prioritas program. Namun pada tanggal 31 Maret 2026, dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP tahun 2026, dikarenakan adanya pergantian pimpinan. Dalam Perjanjian Kinerja revisi tersebut, memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan, dan dijabarkan menjadi 15 (lima belas) Indikator Kinerja, serta dilakukan revisi anggaran.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat BPPSDM Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 118,14, mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I Tahun sebelumnya yang sebesar 112,92 dengan predikat istimewa. Dari 2 (dua) Indikator Kinerja yang diukur pada periode tersebut, diperoleh predikat berkinerja **Istimewa**.



Gambar 7 Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2026

Sumber: Aplikasi kinerjaku

Adapun rincian NKO pada masing-masing IKU disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDM KP Triwulan I Tahun 2026

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Target TW 1 2026	Capaian TW 1 2026	%
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM KP	%	86	86	100	116,28
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM KP	%	0,5			
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM KP	%	92,1			
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDM KP	Level	3,6			
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM KP	Nilai	88,2			
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDM KP	Nilai	81,75			
		7	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDM KP	Nilai	77			
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM KP	Indeks	81,5			
		9	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDM KP	%	85			
		10	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDM KP	%	100			
		11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP	Nilai	81			
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDM KP	%	77	77	100	120



No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Target TW 1 2026	Capaian TW 1 2026	%
		13	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM KP	Nilai	78			
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDM KP	%	92			
		15	Persentase Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang Terimplementasi secara Efektif dan Terdokumentasi	%	60			

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

4.2. REKOMENDASI

Secara umum, kinerja Sekretariat BPPSDMKP Pada Triwulan I tahun 2026 menunjukkan hasil kinerja yang baik, sebagaimana ditunjukkan oleh capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO)** sebesar **118,14%** atau di atas 100%.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka rekomendasi yang disampaikan agar:

- 1) Capaian kinerja diupayakan lebih baik di Triwulan II tahun 2026 dengan melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara sistematis dan berkala, 2) dalam rangka memitigasi indikator-indikator yang mengalami hambatan serta menyusun rencana aksi perbaikan yang terukur dan dapat dieksekusi dalam waktu yang tepat guna memastikan target kinerja dapat tercapai secara optimal.



LAMPIRAN





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Joni Haryadi D**

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA

Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM KP (%)	86
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM KP (%)	≤0,5
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM KP (Nilai)	92,1
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDM KP (Level)	3,6
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM KP (Nilai)	88,2
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDM KP (Nilai)	81,75
		7	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDM KP (Nilai)	77
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM KP (Indeks)	81,5
		9	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDM KP (%)	85
		10	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDM KP (%)	100
		11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP (Nilai)	81
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDM KP (%)	77
		13	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM KP (Nilai)	78
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDM KP (%)	92

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	38.969.730.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Satker Binaan Sekretariat BPPSDM KP)	46.837.832.000
Total Anggaran Lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2026		85.807.562.000

Jakarta, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA

Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


Lilly Aprilya Pregiwati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM KP (%)	86
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM KP (%)	≤0,5
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM KP (Nilai)	92,1
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDM KP (Level)	3,6
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM KP (Nilai)	88,2
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDM KP (Nilai)	81,75
		7	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDM KP (Nilai)	77
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM KP (Indeks)	81,5
		9	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDM KP (%)	85
		10	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDM KP (%)	100
		11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP (Nilai)	81
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDM KP (%)	77
		13	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM KP (Nilai)	78
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDM KP (%)	92
		15	Persentase Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang Terimplementasi secara Efektif dan Terdokumentasi (%)	60

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	31.918.571.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Satker Binaan Sekretariat BPPSDM KP)	46.837.832.000
Total Anggaran Lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2026		78.756.403.000

Jakarta, Maret 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


Lilly Aprilya Pregiwati